

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fitra Arsil, 2017, *Teori Sistem Pemerintahan*, Depok: Rajawali Press
- Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (telaah perbandingan konstitusi berbagai negara)*, Cet.1, Jakarta: UI-PRESS
- \_\_\_\_\_, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indoensia (Pergeseran keseimbangan antara Individualisme dan kolektivisme dalam kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi selama Tiga Masa Demokrasi, 1945 - 1980-an)*, cet. I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve
- Anton Beker dan Ahmad CharisZubair, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius
- Miriam Budiardjo, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sutrisno Hadi, 1983, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: UGM Press
- Fahri Hamzah, 2011, *Negara, Pasar dan Rakyat*, Jakarta: Faham Indonesia
- M. Arie Herdianto, 2015, *Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dalam Upaya Menguatan Sistem Presidensial di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya
- Komisi Pemilihan Umum, 2010, *Modul I: Pemilu untuk Pemula*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama, Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Matthew Justin Streb, 2013, *Law and Election Politics: The Rules of the Game*, New York:Routledge
- Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2006, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LabHukum Fakultas Hukum UMY

Firman Noor, *dkk.*, 2015, *Evaluasi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2014*, Jakarta: Institut Riset Kepemiluan

Hendarmin Ranadireksa, 2007, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Jakarta: Fokusmedia

Sumardi Suryabrat, *Metode Penelitian*, 2006, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hanta Yuda AR, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

### **Jurnal**

Shanti Dwi Kartika, “Presidential threshold dalam Revisi UU Pilpres”, *Jurnal Singkat (P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI)*, Volume V, Nomor 14/II/P3DI (Juli 2013)

Endang Komara, “Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi”, *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2015)

Muhammad Siddiq Armia, *dkk.*, “Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional”, *Petita*, Volume 1, Nomor 2, (Oktober 2016)

Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 3, Nomor 1, (April 2014)

Lutfil Ansori, “Telaah Terhadap Presidential Threshold terhadap Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis*, Volume 4, Nomor 1, (Juni 2017)

Ahmad Hendra, “Implikasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Serentak Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1, Edisi 3, (Tahun 2013)

Ahmad Farhan Subhi, “Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume II, Nomor 2, (Desember 2015)

Widaningsih, “Implikasi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 19, Nomor 1, (Juni 2014)

Kasman Siburian, “Pemilihan Umum Serentak dan Implikasinya Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia”, Jurnal Hukum Patik, Edisi 4, (Tahun 2012/2013)

Ria Casmi Arrsa, “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, (September 2014)

### **Makalah**

Hamdan Zoelva, “Menuju Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Bersih dan Demokratis”, (Juli 2011)

Agus Adhari, “Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019”, (Maret 2016)

Jimly Asshiddiqie, “Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial” , (November 2011)

### **Modul**

Titi Pribadi dan Ali Muhyidin, “Pendekatan dalam Analisis Sistem Politik”, ISIP4213, MODUL 1, (dalam pdf)

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, “Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Sistem Presidensial”, MODUL 2015, (dalam pdf)

Andrews Reynolds, dkk, “Electoral System Design: The New International IDEA Handbook”, International IDEA 2015, (dalam pdf)

### **Thesis**

Ngurah Agung Sayoga Raditya, Igusti, 2013, “Pengaturan Ambang Batas Formal (Formal Threshold) dalam Konteks Sistem Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia” (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar)

### **Peraturan Perundang-undangan/Naskah Akademik**

R.I., Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang “Pemilihan Umum”

R.I., Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum”

Kementerian Dalam Negeri, 2016, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum,” (dalam pdf)

### **Putusan Pengadilan**

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang “Uji Materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945”

### **Internet**

Imam Agus Faizal, “Penyederhanaan Sistem Pemilu Melalui UU No. 7 tahun 2017”, 26 November 2017, <http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-7-tahun-2017>

Anis Azizah, “Sistem Pemilihan Umum”, 26 November 2017, <https://www.kompasiana.com/anisazizah96/59a753fb159344519b0ea182/sistem-pemilihan-umum>

Ihsanuddin, “Jokowi Teken UU Pemilu”, 11 september 2017, [http://nasional.kompas.com/read/2017/08/19/13405771/jokowi-teken-uu-pemilu-, \(08.27\)](http://nasional.kompas.com/read/2017/08/19/13405771/jokowi-teken-uu-pemilu-, (08.27))

Kemendikbud, “ambang batas”, 26 November 2017, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>

Kumparan, “5 Argumentasi Mendagri PT Hasil Pileg 2014 Bisa Dipakai Pilpres 2019”, 28 November 2017, <https://kumparan.com/muhamad-iqbal/5-argumentasi-mendagri-pt-hasil-pileg-2014-bisa-dipakai-pilpres-2019>

- Kumparan, “Alasan *Presidential threshold* tak Bisa Dipakai di Pemilu 2019”, 28 November 2017, <https://kumparan.com/muhamad-iqbal/5-alasan-presidential-threshold-tak-bisa-dipakai-di-pemilu-2019>
- Kumparan, “*Residential Threshold* dan Ancaman Mendagri Tarik Diri dari RUU Pemilu”, 11 September 17, [https://kumparan.com/muhamad-iqbal/argumentasi-mendagri-ngotot-presidential-treshold-harus-20-persen,\(08.30\)](https://kumparan.com/muhamad-iqbal/argumentasi-mendagri-ngotot-presidential-treshold-harus-20-persen,(08.30))
- Mahkamah Konstitusi, “Ahli: Ambang Batas Tidak Mungkin Diterapkan dalam Pemilu Serentak”, 28 November 2017, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14119#.WhzJktKWbMy>
- Redaksi Editorial, “Ini Arti *Presidential Threshold* dan *Parliamentary Threshold*”, 26 November 2017, <https://editorialindonesia.com/2017/07/21/ini-arti-presidential-threshold-dan-parliamentary-threshold/>
- Republika, “MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi UU Pemilu”, 11 September 2017, [http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/08/03/ou3e9z330-mk-gelar-sidang-perdana-uji-materi-uu-pemilu,\(08.30\)](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/08/03/ou3e9z330-mk-gelar-sidang-perdana-uji-materi-uu-pemilu,(08.30))
- Wikipedia, “Sistem Parlementer”, 26 November 2017, [https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_parlementer](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer)

